



INDRA KUSUMAWARDHANA

MENGARUNGI LAUTAN BEROMBAK: INDONESIA DAN ISU PENCURIAN IKAN DI ASIA TENGGARA



MENGARUNGI LAUTAN BEROMBAK:
**INDONESIA DAN ISU PENCURIAN IKAN
DI ASIA TENGGARA**



INDRA KUSUMAWARDHANA



Alamat:
Graha Pandawa, Blok F2, Lemahdadi,
Bangunjiwo, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta 55184
Email : thejournalpublishing@gmail.com
Website : thejournalish.com



ISBN 978-623-6992-50-0



9 786236 992500

**MENGARUNGI LAUTAN BEROMBAK:
INDONESIA DAN ISU PENCURIAN IKAN DI
ASIA TENGGARA**

Indra Kusumawardhana

Sanksi pelanggaran Pasal 72:**Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**MENGARUNGI LAUTAN BEROMBAK:
INDONESIA DAN ISU PENCURIAN IKAN DI
ASIA TENGGARA**

Indra Kusumawardhana

ISBN: 978-623-6992-50-0

Editor:

Rahmatiah

Desain Sampul:

Mei Yenti

Tata Letak:

Tim The Journal Publishing

xx+330 Hlm; 14,8 Cm X 21 Cm.

Cetakan 2021

Penerbit:

THE JOURNAL PUBLISHING

Jl. Patukan Gamping Tengah RT.004 RW. 015, Ambarketawang,

Gamping Tengah, Sleman, DIY.

Cp. 0823-2679-6566

*Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang Memperbanyak buku ini dalam bentuk dan
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit*



KATA PENGANTAR

Dr. Ian Montratama, MSi. (Han)

Anggota Dewan Pembina Defense Diplomacy Strategic Forum (DDSF)

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan segala aktivitas. Saya merasa bangga dan menyambut gembira atas diterbitkannya buku “Mengarungi Lautan Berombak: Indonesia dan Isu Pencurian Ikan di Asia Tenggara” oleh Saudara Dr. Indra Kusumawardhana ini sebagai publikasi akademik yang tajam mengulas tentang inti dari ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini.

Pada sebagian besar negara berkembang, seperti Indonesia, isu perbatasan negara kerap menjadi persoalan yang dilematis. Pertahanan negara dibangun untuk mengatasi berbagai ancaman militer akan bercampur dengan ancaman non-militer. Di lain pihak, negara-negara berkembang juga harus menghadapi sekaligus berbagai isu pembangunan ekonomi karena adanya sejumlah ketergantungan pada negara maju yang bisa jadi merupakan pihak yang memiliki benturan kepentingan di perbatasan. Alhasil, isu-isu pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian dari kerentanan domestik yang kerap mendominasi agenda pengembangan postur pertahanan negara berkembang, di luar masalah klasik yang dihadapinya, yaitu terbatasnya kapasitas sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan kapasitas kekuatan militernya.

Politik dunia saat ini sedang tertuju pada kawasan baru yang bernama Indo-Pasifik. Sebuah kawasan yang menggabungkan aspek maritim dari Asia Timur, Asia Selatan, Oseania dan Pasifik Barat. Kawasan yang digagas oleh Amerika Serikat, India, Jepang dan Australia sejak tahun 2007 yang pada hakekatnya adalah untuk mengimbangi kekuatan Cina terutama di Laut Cina Selatan (LCS). Cina sejak tahun 2009 telah mengklaim kepada PBB atas sebagian besar LCS dan melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Sementara Vietnam merupakan negara yang tidak kalah asertifnya dengan Cina di LCS. Kapal nelayan Vietnam yang ditangkap dan akhirnya ditenggelamkan aparat keamanan Indonesia merupakan yang terbanyak di antara kapal nelayan lain. Klaimnya di LCS juga termasuk yang sangat ambisius setelah Cina, yaitu menjorok hingga ke Kepulauan Spratly (yang lebih dekat ke Malaysia dan Filipina). Vietnam sedang memodernisasi militernya secara ambisius. Dalam publikasi Lowly Institute dalam Indeks Kekuatan Asia 2019 menempatkan Vietnam di peringkat 11 dan Indonesia di peringkat 13. Vietnam memiliki delapan kapal selam, sementara Indonesia baru tiga saja. Bahkan pesawat tempurnya berjumlah 74 unit dan Indonesia 33 saja. Suatu saat Vietnam akan menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara.

Sesuai dengan kebijakan Kementerian Pertahanan RI di tahun 2020-2024, kita membutuhkan gagasan visioner dalam membangun kekuatan pertahanan kita. Dalam pandangan saya, kita harus berani dalam merencanakan jauh ke depan, dan menjadikan Laut Natuna Utara sebagai fokus pembangunan postur TNI. Walau sengketa yang muncul di

permukaan hanya masalah insiden masuknya kapal penangkap ikan asing di ZEE Indonesia, namun di balik itu masih ada hal yang lebih fundamental. Laut Cina Selatan sesungguhnya merupakan suatu medan persaingan antar kekuatan besar dunia.

Persaingan kekuatan besar itu melibatkan dua polar, yaitu Cina dan Amerika Serikat. Polar Amerika Serikat telah melampaui aliansi formalnya. Selain Jepang dan Australia, Amerika Serikat telah membangun kuasi aliansi dengan Singapura dan Vietnam. Di bulan Agustus 2021, Menhan dan Menlu AS telah berkunjung secara resmi ke kedua negara tersebut. Namun tidak ke Indonesia. Sementara di bulan yang sama, Cina dan Rusia mengadakan latihan militer bersama yang melibatkan sepuluh ribu pasukan. Masih belum pasti apakah Rusia dan Cina akan membentuk satu poros baru untuk mengmbangi Amerika Serikat di LCS.

Dalam menyikapi situasi yang penuh ketidakpastian tersebut di atas, Indonesia akan terus mempromosikan diplomasi damai. Namun di sisi lain, kekuatan militer Indonesia juga harus diperkuat agar posisinya disegani negara-negara di kawasan. Masalah pencurian ikan di ZEE Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dibiarkan. Semakin dibiarkan akan semakin banyak gelombang kapal penangkap ikan yang masuk perairan Indonesia. Kapal Cina dan Vietnam merupakan ancaman nyata yang harus ditangani dengan tegas.

Buku ini secara rinci mendeskripsikan situasi pencurian ikan di ZEE Indonesia di perairan Natuna, terutama oleh kapal Cina dan Vietnam. Penulis menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjukkan sikap asertif dengan menanggapi isu pencurian ikan lebih

dari sekadar masalah pencurian sumber daya maritim oleh aktor *non-state* (kapal ikan asing), tetapi lebih pada respon yang menampilkan sikap Indonesia siap untuk mempertahankan perairan Natuna bahkan dengan kekuatan militer demi menjamin National Security. Oleh karenanya, dinamika respons Indonesia menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam.

Dapat dikatakan isu pencurian ikan di perairan Natuna merupakan ajang untuk menunjukkan kemampuan dan intensi Indonesia untuk menggunakan kekuatan pertahanannya dalam menegakkan hak berdaulat. Kebijakan Indonesia akan memiliki dampak nyata bukan saja demi menyelamatkan potensi ekonomi di ZEEI, namun juga bagi masa depan kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna yang sangat strategis dari aspek kampanye militer di LCS. Pada intinya, selain ketegasan pada para penyusup ZEEI, TNI dan Bakamla harus senantiasa ditingkatkan daya tangkalnya karena potensi ancaman bersifat progresif. Suka tidak suka sesungguhnya perlombaan senjata telah dimulai di LCS. Pandangan filsuf Yunani Thucydides akan berlaku, yaitu “yang kuat akan melakukan apa yang dia dapat dan yang lemah hanya akan menderita.”

PRAKATA

Alhamdulillahirobbilalamin, demi masa, segala puji hanyalah milik Allah SWT selaku Tuhan semesta alam. Terbalut oleh kerendahan hati, penulis bersyukur dapat menuntaskan penulisan buku dengan judul “Mengarungi Lautan Berombak: Indonesia dan Isu Pencurian Ikan di Asia Tenggara”. Penulis menyadari bahwa karya ini dapat terselesaikan tiada lain adalah karena limpahan rahmat beserta hidayah dari Allah SWT yang telah menuntun penulis meretas jalan menggapai mimpi sebagai pembelajar seumur hidup.

Buku ini merupakan karya sederhana, tetapi secara hakikatnya untuk penulis adalah *magnum opus* sebagai studi lanjutan dari tema disertasi penulis ketika menyelesaikan studi Doktorat. Artikulasi kerja intelektual dari satu gagasan yang abstrak hingga pada akhirnya terkristalisasi menjadi sebuah narasi akademis sudah tentu bukanlah upaya penulis sendiri, melainkan tidak lepas dari campur tangan berbagai pihak yang sangat berjasa di dalam prosesnya. Melalui prakata ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada setiap pihak yang telah membantu penulis dalam menuntaskan naskah akademis ini hingga paripurna.

Pertama, penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat dan sangat terpelajar Prof. Dr. Arry Bainus, M.A selaku guru yang begitu sabar dan tak pernah henti memberikan semangat kepada penulis di dalam proses menjalani studi Doktorat. Kenangan selama berdiskusi dan belajar dari beliau telah

membentuk penulis dan menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan setelah studi Doktoral.

Buku ini juga tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan, motivasi dan peran dari berbagai pihak terdekat dengan penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada istriku Ismi Nurjayanti Karim, SE yang selalu setia dan ikhlas menemani serta mendampingi di dalam berbagai situasi dan kondisi; susah, senang, dan sedih telah menjadikan engkau begitu mulia di hati penulis. Putri cantik kami Cahaya Kanaya Almeera Kusumawardhana yang merupakan bukti cinta kami dan merupakan titipan illahi yang diberikan oleh Allah SWT tepat sebelum penulis melanjutkan studi S3 ke Universitas Padjadjaran, Bandung. Serta, putra kami Kanzou Qurtova Kusumawardhana yang kehadirannya telah membuat kehidupan kami begitu indah dan penuh makna.

Selain itu, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekaligus mentor di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto, Prof. Dr. Der. Soz. Gumilar Soemantri, Prof. Triyuni Soemartono, Mas Radhiatmoko. Juga kepada Marsenal Pertama TNI Achmad Sajili selaku Asisten Deputi Pertahanan Negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Kemudian para sahabat di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Mas Dumas Amali Radityo dan mas Ahmad Almaududy Amri, Ph.D. Mereka semua telah berjasa memperkaya khazanah wawasan penulis terkait dinamika tantangan keamanan maritim negara kita tercinta,

di mana pada prosesnya begitu bermanfaat bagi penulis dalam menyusun buku ini.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini memuat manfaat dan menjadi ladang pahala bagi penulis dan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Buku ini tentunya tidaklah sempurna tanpa kekurangan, oleh karenanya bersifat terbuka terhadap kritik dan saran membangun yang akan diterima dengan hati terbuka dan lapang dada oleh penulis sebagai seorang yang mencintai diskursus dan ilmu pengetahuan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
GLOSSARY	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 <i>Maritime Security</i>	18
2.1.1 <i>Security dan Konstruktivisme Sosial: Norms, Identities dan Interest</i>	27
2.1.2 <i>Maritime Security</i> Dalam Pendekatan Konstruktivisme Sosial ..	45
2.2 <i>Maritime (In)Security; IUU Fishing sebagai Non-Traditional Maritime Security Threat</i>	55
2.3 Analisis Kebijakan Luar Negeri Dalam Pendekatan Konstruktivis	59
2.4 Kerangka Konseptual	68
2.5 Metode Penelitian.....	72
BAB III DINAMIKA KONTESTASI KEAMANAN MARITIM DI NATUNA TERKAIT <i>IUU FISHING</i>	75
3.1 Meretas Korelasi Dinamika Keamanan Maritim Di Natuna Dengan Laut Tingkok Selatan: Pendekatan Tradisional dan Non Tradisional	75

3.1.1 Dinamika Keamanan Maritim Tradisional Di Laut Cina Selatan: Kontestasi negara negara ASEAN dengan negara Cina	76
3.1.2 Dinamika Keamanan Maritim Nontradisional Di Laut Cina Selatan: Dari <i>Maritime Piracy</i> hingga IUU Fishing	112
3.1.2.1 <i>Maritime Piracy</i>	113
3.1.2.2 <i>Maritime Terrorism</i>	117
3.1.2.3 <i>People Smuggling</i>	122
3.1.2.4 <i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i>	125
3.1.3 <i>Something About Fish: Meretas Keterkaitan Natuna Dengan Kontestasi Keamanan Maritim di LCS Terkait Aktivitas IUU Fishing</i>	134

**BAB IV INSTITUSI, IDENTITAS, DAN KEPENTINGAN DI
DALAM DINAMIKA KEAMANAN MARITIM DI..... 148**

4.1 Rezim Keamanan Maritim Internasional di Seputar Natuna dan Laut Cina Selatan: Antara UNCLOS dan Kerja Sama Terkait <i>IUU Fishing</i>	148
4.2 Identitas dan Kepentingan Indonesia, Vietnam, dan Cina Di Dalam Dinamika Keamanan Maritim Asia Tenggara.....	159
4.2.1 Identitas dan Kepentingan Indonesia di Abad 21: Kembali ke Laut.....	160
4.2.2 Wawasan Nusantara Sebagai Identitas Indonesia	161
4.2.3 Poros Maritim Dunia Sebagai Kepentingan Indonesia.....	165
4.3 Identitas dan Kepentingan Di Dalam Kebijakan Luar Negeri Vietnam.....	174
4.3.1 Identitas Di Dalam Kebijakan Luar Negeri Vietnam.....	176
4.3.2 Kepentingan Di Dalam Kebijakan Luar Negeri Vietnam.....	180

4.4 Identitas dan Kepentingan Cina Di Dalam Dinamika Keamanan Maritim LCS	182
4.4.1 Identitas Di Dalam Kebijakan Luar Negeri Cina	183
4.4.2 Kepentingan Di Dalam Kebijakan Luar Negeri Cina Terkait Laut Cina Selatan	187
BAB V RESPONS INDONESIA TERHADAP VIETNAM DAN CINA DI DALAM KONTESTASI KEAMANAN MARITIM PASCA KEBIJAKAN TENGGELAMKAN KAPAL.....	198
5.1 Kontestasi Keamanan Maritim Terkait Aktivitas <i>IUU Fishing</i> Antara Indonesia Dengan Cina dan Vietnam	198
5.1.1 Indonesia-Cina.....	205
5.1.2 Indonesia-Vietnam.....	215
5.2 Perbedaan Respons Indonesia Terhadap Cina dan Vietnam: Identitas dan Kepentingan.....	222
5.2.1 Respons Indonesia Terhadap Cina: Antara Kepentingan Menjaga Kedaulatan dengan Kepentingan Ekonomia	224
5.2.2 Respons Indonesia Terhadap Vietnam: Identitas dan Kepentingan Bersama Dalam Menghadap Masalah <i>IUU Fishing</i>	249
5.2.3 Vietnam-Cina: Benturan Identitas dan Kepentingan Terkait Isu Laut Cina Selatan	268
5.2.4 Perbedaan Respons Indonesia Terhadap Cina dan Vietnam	273
BAB VI KESIMPULAN	277
6.1 Kesimpulan	277
6.2 Saran Akademis	279
6.3 Saran Praktis	281
DAFTAR PUSTAKA	283

DAFTAR GAMBAR

1.1 Komposisi Ancaman Keamanan Maritim Indonesia	2
2.1 <i>Maritime Security Matrix</i>	47
2.2 <i>Explaining a Foreign Policy Action</i>	66
2.3 Kerangka Konseptual.....	71
3.1 Peta Landas Kontinen dan Batas ZEE di Laut Cina Selatan	81
3.2 <i>Irregular maritime arrivals to Australia by select nationalities (2011-2012)</i>	123
3.3 Peta Jalur Penyelundupan Manusia menuju Australia dan Kanada Melalui Laut	124
3.4 <i>Seabed Boundary</i> antara Indonesia dan Vietnam di Laut Cina Selatan	137
4.1 Peta Identitas dan Kepentingan Indonesia Terkait Keamanan Maritim di LCS.....	160
4.2 Jumlah Kapal Yang Ditenggelamkan KKP, TNI AL, Dan POLAIR Oktober 2014-April 2017	166
4.3 Rekapitulasi Data Tangkapan Unsur Satgas 115 Januari-April 2017	168
4.4 Peta Identitas dan Kepentingan Vietnam.....	175
4.5 Peta Identitas dan Kepentingan Cina di Laut Cina Selatan.....	182
4.6 Produksi dan Konsumsi Minyak Bumi dan cairan lainnya Cina 1993-2019	189
4.7 <i>Major Crude Oil Trade Flows in the South China Sea</i>	190
4.8 <i>Sea Lines of Communication</i> di Laut Cina Selatan.....	192
4.9 Peta Historis Sebelas Garis Putus-Putus Cina.....	194
4.10 Klaim maritim Laut Cina Selatan	196

5.1 Pola Persepsi Indonesia Terkait *IUU Fishing* di Kepulauan Natuna
Terhadap Vietnam dan Cina 274

DAFTAR GRAFIK

4.1 Perbandingan Pertumbuhan GDP Cina dengan Amerika Serikat 1978-2020	184
4.2 Composite Index of National Capability 1970-2007	185
5.1 Perbandingan <i>Military Expenditure</i> antara Cina dan Negara-Negara di Asia Tenggara 2010-2017.....	232
5.2 Perbandingan <i>Military Expenditure</i> antara Cina dan Beberapa Pemain Penting di Indo-Pacific	233

DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Lokasi <i>Overfished Stocks</i> di Indonesia.....	3
2.1 Daftar Informan	?
3.1 Military expenditure by country in Southeast Asia in constant (2019) 2010-2017	108
3.2 Aksi Pembajakan dan Perampokan Kapal yang Terlaporkan Di Asia Tenggara	115
3.3 Perbandingan Angka Insiden Pembajakan Kapal di Laut Cina Selatan dan Asia Tenggara dari Tahun 2010-2014.....	117
3.4 Data Serangan Teroris Maritim Abu Sayyaf di Asia Tenggara	120
3.5 Suplai Ikan Per-Kapita di Cina dan ASEAN 1980-2013.....	127
3.6 Data Komparasi Produksi Ikan <i>Claimant States</i> di <i>Spratly Islands</i> Dengan Asia dan Dunia	128
4.1 Accession Status of UN Fish Stock Agreement	156
4.2 Data Negara-Negara Di LCS Yang Telah Mengembangkan Kebijakan IPOA-IUU.....	157
5.1 Data Kasus Aktivitas <i>Illegal Fishing</i> oleh Nelayan Cina di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna Pada 2009-2016.....	212

GLOSSARY

AL	: Angkatan Laut
<i>Archipelagic State</i>	: Negara Kepulauan
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASEAN-WEN	: <i>ASEAN Wildlife Enforcement Network</i>
CTI-CFF	: <i>Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security</i>
DKP	: Departemen Kelautan dan Perikanan
Delimitasi	: Penetapan Garis Batas antara dua negara yang sebagian wilayahnya <i>overlapping</i> di laut.
HI	: Hubungan Internasional
IPOA-FAO	: <i>International Plan of Action-Food and Agriculture Organization of the United Nations</i>
IPOA-IUU	: <i>International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i>
ISA	: <i>International Studies Association</i>
<i>IUU Fishing</i>	: <i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i>
IORA	: <i>Indian Ocean Rim Association</i>
Jokowi	: Joko Widodo
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
LCS	: Laut Cina Selatan
LOS Convention	: <i>Law Of the Sea Convention</i>
Mabes	: Markas Besar

MMAF	: <i>Ministry of Marine Affairs and Fisheries</i>
MALSINDO	: Malaysia, Singapura dan Indonesia
MNC	: Multi-National Corporation
<i>Nine-Dotted Line/Nine-Dashed Line</i>	: Klaim unilateral Cina di Laut Cina Selatan berupa demarkasi sembilan garis putus-putus yang hampir menguasai keseluruhan Laut Cina Selatan
NGO	: <i>Non-Government Organization</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
RI	: Republik Indonesia
RFMO	: <i>Regional Fishery Management Organization</i>
RSAP	: <i>Regional Strategies Action Program</i>
RSC	: <i>Regional Security Complex</i>
RSCT	: <i>Regional Security Complex Theory</i>
SARA	: Suku Agama Ras dan Antargolongan
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
SEAFDEC	: <i>Southeast Asia Fisheries Development Center</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UNEP	: <i>United Nations Environment Programme</i>
WTC	: <i>World Trade Center</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I

PENDAHULUAN

Implementasi agenda Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko Widodo menuntut adanya kemampuan Indonesia untuk mengamankan kedaulatan nasional dan keamanan maritim. Namun, implementasi tersebut nampaknya menghadapi tantangan terkait pelanggaran kedaulatan di wilayah perairan Indonesia serta berbagai ancaman yang meliputinya. Seperti yang dijelaskan oleh Senia Febrica (2017), berdasarkan berbagai dokumen resmi serta pendapat ahli yang tersedia; terdapat empat ancaman pada dimensi maritim Indonesia yakni *illegal fishing*, *illegal migrants*, *maritime border issues*, dan *smuggling*.¹

Dari empat ancaman tersebut, maraknya aktivitas *illegal fishing* (Gambar 1.1) menjadi yang paling mendapat sorotan dikarenakan ancaman kemerosotan cadangan ikan di wilayah perairan Indonesia (Chapsos & Malcolm, 2017; Connelly, 2015; Febrica, 2017; Gindarsah & Priamarizki, 2015; Hongzhou, 2015; Nainggolan, 2015; Negara & Das, 2017). Salah satu lokasi yang menjadi preferensi aktivitas pencurian ikan antara lain di perairan Anambas dan Natuna yang dilakukan oleh kapal-kapal dengan bendera kebangsaan asing (Tabel 1.1). Keterlibatan kapal-kapal asing, terutama Cina dan Vietnam memunculkan polemik dalam

¹ Dokumen - dokumen yang dirujuk oleh Senia Febrica adalah: Dewan Maritim Indonesia 2007: 4-9; Indonesian Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs 2008: 51-52; Indonesian MFA 2004: 3; Indonesian Ministry of State Secretariat 2008: 29; Sudrajat 2005: 80-81; Suristyono 2005: 47, 70-71).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asrudin, M. J. S. dan Maliki. M (2014). *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif*. Malang: Intrans Publishing.
- Arabinda, A. (2014). Whither Southeast Asia Terrorism? (Vol. 6). World Scientific. Imperial College Press, London.
- Atinà, F. (2016). Traditional Security Issues. In China, the European Union, and the International Politics of Global Governance (Hal. 175-193). Palgrave Macmillan, New York.
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Balzacq, T. (2010). *Constructivism and securitization studies*. The Routledge Handbook of Security Studies. New York: Routledge.
- Bergesen & et al (eds), (2001). Yearbook of International Co-operation on Environment and Development 2001/2002. Earthscan Publications, 54.
- Bull, H. (2002). The anarchical society: a study of order in world politics. 3rd Edition, New York: Palgrave.
- Brighi, Elisabetta. (2013). *Foreign policy, domestic politics and international relations: the case of Italy*. Routledge.
- Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Paterson, M., Reus-Smit, C., & True, J. (2005). *Theories of International Relations*. Palgrave Macmillan (3rd ed.). New York: Palgrave Macmillan.
- Bussert, J., & Elleman, B. (2011). People's Liberation Army Navy: combat

- system technology, 1949-2010. Naval Institute Press.
- Buzan, B. (1990). *The European security order recast: Scenarios for the post-cold war era*. London: Pinter Pub Ltd.
- Buzan, B., & Waever, O. (2003). *Regions and powers: the structure of international security* (Vol. 91). Cambridge: Cambridge University Press.
- Buzan, B. (2008). *People, states & fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era*. Colchester: Ecpr Press.
- Buzan, B., & Hansen, L. (2009). *The evolution of international security studies*. New York: Cambridge University Press.
- Buzan, B., & Herring, E. (1998). *The arms dynamic in world politics*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Buzan, B., Jones, C., & Little, R. (1993). *The Logic of Anarchy*. New York: Columbia University Press.
- Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. De. (1998). *Security: a new framework for analysis*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Booth, K. (2007). *Theory of world security* (Vol. 105). Cambridge University Press.
- Cavelty, M. D., & Mauer, V. (2010). *The Routledge Handbook of Security Studies*. New York: Routledge.
- Christopher, W., & Meng, Y. (Eds.). (2011). *Security Studies: A Reader*. Oxon: Routledge.
- Colson, D.A. and Smith, R.W. (eds) (2005). *International Maritime Boundaries* Volume VI, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands: 4303.
- Corbett, J. (2012). *Some Principles of Naval Strategy*. London: Longmans, Pg.

- Cresswell, J. . (2014). *Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed methods approaches*. SAGE Publications Ltd (4th Edition). London: SAGE Publications.
- Cronin, P.; Kaplan, R. (2012): ‘Cooperation from Strength: U.S. Strategy and the South China Sea.’ Di dalam: Cronin, P. (ed.): *Cooperation from Strength: 3 U.S. Strategy and the South China Sea*, Washington: Center for New American Security: 12.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. London: Sage.
- De Vaus, D. A., & de Vaus, D. (2001). *Research design in social research*. London: Sage.
- Do Thanh Hai. (2016). Vietnam and the South China Sea. Politics, Security and Legality. Taylor & Francis Limited.
- Erickson, A. S. (2015). Evaluation of China’s conventional military power: The naval and air dimensions. In J. H. Chung (Ed.), *Assessing China’s power*. New York: Palgrave Macmillan.
- Evans, M. (2015). Maritime Boundary Delimitation. In *The Oxford Handbook of the Law of the Sea*. Oxford.
- Ewan W. A. , “Geopolitics: Internationnal Boundaries as Fighting Places” dalam Colin S Gray dan Geoffrey Sloan, *Geopolitics: Geography and Strategy*, (London: Frank Cass Publishers, 1999).
- Forbes, V. L. (2014). *Indonesia’s delimited maritime boundaries*. Heidelberg: Springer.
- Febrica, S. (2017). *Maritime Security and Indonesia: Cooperation, Interests and Strategies*. New York: Taylor & Francis.
- Gadinger, F., & Peters, D. (2015: 150-175). *Feedback Loops as Links between Foreign Policy and International Relations: The US War*

- on Terror*. Di dalam *Theorizing Foreign Policy in a Globalized World*. Palgrave Macmillan, London.
- Green, M., Hicks, K., & Cancian, M. F. (2016). *Asia-Pacific rebalance 2025: Capabilities, presence, and partnerships*. Rowman & Littlefield.
- Griffiths, M. (2007). *International Relations Theory for 21st Century*. New York: Routledge.
- Guzzini, S., & Jung, D. (Eds.). (2004). *Contemporary security analysis and Copenhagen peace research*. Routledge.
- Guzzini, S. (2004). 4 "The Cold War is what we make of it". When Peace Research Meets Constructivism in International Relations. In S. Guzzini and D. Jung (eds.), *Contemporary Security Analysis and Copenhagen Peace Research*, 40-53.
- Hamzah, B. A. (2015). *Sinking the ships: Indonesia's foreign policy under Jokowi*.
- Harrison, L., & Callan, T. (2013). *Key research concepts in politics and international relations*. London: SAGE Publications Limited.
- Hayton, B. (2014). *The South China Sea: The struggle for power in Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Hellwig, T. (2014). *Globalization and Mass Politics: Retaining the Room to Maneuver*. New York: Cambridge University Press
- Hermawan, "Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu, dan Metodologi", (Yogyakarta : Graha Ilmu , 2007: 40).
- Hill, C. (2003). *The changing politics of foreign policy*. London: Palgrave Macmillan.
- Hughes, C. W., & Lai, Y. M. (Eds.). (2014). *Security studies: a reader*. Routledge.

- Ikhtiar, R. W. (2011). Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi Kasus: *Illegal fishing* Periode Tahun 2005-2010. Jakarta. Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Jackson, R & Sørensen, G. (2013). *Introduction to international relations: theories and approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Jenner, C. J., & Thuy, T. T. (Eds.). (2016). The South China Sea. Cambridge University Press.
- Kang, D. C. O. (2007). *China rising: Peace, power, and order in East Asia*. Columbia University Press.
- Kementerian Pertahanan, R. I. (2009). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Kemhan.
- Kratochwil, F. V. (1991). Rules, norms, and decisions: on the conditions of practical and legal reasoning in international relations and domestic affairs (Vol. 2). Cambridge: Cambridge University Press.
- Kroeber, A. R. (2016). China's economy. What everyone needs to know. Oxford: Oxford University Press.
- Kumar, Rajendra. (2008). *Research Methodology*. New Delhi: APH Publishing Corporations.
- Klein, N. (2011). Maritime Security and the Law of the Sea. Oxford University Press.
- Kraska, J., & Pedrozo, R. (2013). International maritime security law. Martinus Nijhoff Publishers.
- Lamont, C. (2015). *Research methods in international relations*. SAGE Publications Sage UK: London, England.
- Lake, D. A., & Morgan, P. M. (2010). *Regional orders: Building security*

- in a new world*. University Press: Penn State Press.
- Lanteigne, M. (2016). The South China Sea in China's developing maritime strategy. Dalam *Power Politics in Asia's Contested Waters* (Hal. 97-115). Springer, Cham.
- Lim, K. (2015): 'China's Nationalist Narrative of the South China Sea: A Preliminary Analysis.' Di dalam: Fels, E.; Vu, T. (eds.): *Power Politics in Asia's Contested Waters: Territorial Disputes in the South China Sea*, Cham: Springer: 164.
- Maykut, P., Maykut, P. S., & Morehouse, R. (1994). *Beginning qualitative research: A philosophic and practical guide* (Vol. 6). London: Psychology Press.
- McDevitt, M., & Vellucci, F., Jr. (2012). The evolution of the People's Liberation Army Navy. The Twin missions of area-denial and peacetime operations. In G. Till & P. C. Bratton (Eds.), *Sea power and the Asia-Pacific. The triumph of Neptune?* London: Routledge.
- McNicholas, M. (2016). *Maritime security: an introduction*. Cambridge: Butterworth-Heinemann.
- Merriam, C. (1900). *History of the Theory of Sovereignty since Rousseau*. New Jersey: The Law Book Exchange, ltd.
- Mearsheimer, J. J. (2007). Structural realism. *International relations theories: Discipline and diversity*, 83. di dalam Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (Eds.). (2013). *International relations theories*. Oxford University Press.
- Moore, C., & Farrands, C. (Eds.). (2010). *International relations theory and philosophy: interpretive dialogues*. Oxon: Routledge.
- Odeyemi, C. (2015). UNCLOS and maritime security: the "securitisation" of the South China Sea disputes. *Defense & Security Analysis*, 31(4),

293-302.

- Onuf, N. G. (2012). *World of our making: rules and rule in social theory and international relations*. New York: Routledge.
- Schuster, C. O. (2012). China. Its maritime traditions and navy today. In G. Till & P. C. Bratton (Eds.), *Sea power and the Asia-Pacific. The triumph of Neptune?* London: Routledge.
- Shepherd, L. J. (Ed.). (2013). *Critical approaches to security: An introduction to theories and methods*. London: Routledge.
- Stockholm International Peace Research Institute. (2017). SIPRI Yearbook 2017: Armaments, Disarmament, and International Security. SIPRI Yearbook.
- Spray, S & Roselle, L. (2012). *Research and Writing in International Relations Second Edition*. (V. Mukhija, Ed.). Pearson Education, Inc.
- Sukma, R. (2012). Domestic politics and international posture: constraints and possibilities. *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant*, ed. Anthony Reid. Singapore: ISEAS.
- Susanto & Dicky Munaf. 2015. *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Stavridis, J. G. (2013). *Convergence: illicit networks and national security in the age of globalization*. Washington D.C: Government Printing Office.
- Storey, I. (2013). *Southeast Asia and the rise of China: The search for security*. Routledge.
- Palma, M. A. E., Tsamenyi, M., & Edeson, W. R. (2010). *Promoting sustainable fisheries: The international legal and policy framework*

- to combat illegal, unreported and unregulated fishing* (Vol. 6). Brill.
- Roberts, C., Habir, A., dan Sebastian, L. (2015), eds. *Indonesia's ascent: Power, leadership, and the regional order*. Springer, 256.
- Rosyidin, M. (2015). *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*.
- Rosyidin, M., & Tri Andika, M. (2017). *Indonesia Dalam Pusaran Global: Politik Luar Negeri Susilo Bambang Yudhoyono*. (E. Fitrah, Ed.) (Pustaka II). Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2013), 'Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific: A Threat Assessment', 39.
- UNHCR, *Asylum Trends 2014, Levels and Trends Industrialized Countries*, 23.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2013), 'Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific: A Threat Assessment', 39.
- Wæver, O., Buzan, B., Kelstrup, M., & Lemaitre, P. (1993). *Identity migration and the new security agenda in Europe*. New York: New York St. Martins Press
- Wang, Z. (2012): *Never Forget National Humiliation: Historical Memory in Chinese Politics and Foreign Relations*, New York: Columbia University Press: 192.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wiliam, W. (1986). *Triangulation is Qualitative Cross-Validation*. California: Stanford University Press
- Wright, D. C. (2001). *The history of China*. London: Greenwood Press.

- Wu, S. (2016). *Maritime security in the South China Sea: regional implications and international cooperation*. Routledge.
- Wu, S., & Zou, K. (2009). *Maritime security in the South China Sea: cooperation and implications*. *Maritime security in the South China Sea: Regional implications and international cooperation*, 3-12.
- Zehfuss, M. (2002) *Constructivism in International Relations: The Politics of Reality*, Cambridge: Cambridge University Press.

2. Artikel Dalam Jurnal

- Anggraini, S. D., Kusumawardhana, I., & Ramadhan, I. (2019). The Implication of Indonesia's IUU Fishing Policy in Natuna Territorial Waters towards South China Sea Geopolitics. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 118-132.
- Acharya, A. (1995). *The periphery as the core: The third world and security studies*.
- Adler, E. (1997). Seizing the middle ground: constructivism in world politics. *European journal of international relations*, 3 (3), 319-363.
- Anderson, E. W. (1999). Geopolitics: International boundaries as fighting places. *The Journal of Strategic Studies*, 22(2-3), 125-136. Dalam Colin S Gray dan Geoffrey Sloan, *Geopolitics: Geography and Strategy*, (London: Frank Cass Publishers).
- Ashley, R. K. (1989). Imposing international purpose: Notes on a problematic of governance. *Global changes and theoretical challenges: Approaches to world politics for the 1990s*, 251-91.

- Arsana, I. (2014). *Challenges and opportunities in the delimitation of Indonesia's maritime boundaries: a legal and technical approach*: 165.
- Ba, A. D. (2011). Staking claims and making waves in the South China Sea: how troubled are the waters?. *Contemporary Southeast Asia*, 269-291.
- Ba, A., & Storey, I. (2016). Continuity and change in the South China Sea. In C. Jenner & T. Thuy (Eds.), *The South China Sea: A Crucible of Regional Cooperation or Conflict-making Sovereignty Claims?* (Hal. 71-96). Cambridge: Cambridge University Press.
- Ball, D. (2011). Asia's Naval Arms Race. 25th Asia Pacific Roundtable, Kuala Lumpur, Malaysia, 1. Paper presented to the 25th Asia-Pacific Roundtable, ISIS Malaysia, Kuala Lumpur, 29 May-1 June 2011.
- Booth, K. (2007). *Theory of world security* (Vol. 105). Cambridge University Press.
- Bower, E. Z. (2012, Juli). China reveals its hand on ASEAN in Phnom Penh. In *East Asia Forum*, July (Vol. 28).
- Bueger, C. (2014). *What is maritime security?* *Marine Policy*, 53(Murphy 2010), 159-164.
- Bradford, J. F. (2005). *The growing prospects for maritime security cooperation in Southeast Asia*. Naval War Coll Newport RI.
- Cabral, R. B., Mayorga, J., Clemence, M., Lynham, J., Koeshendrajana, S., Muawanah, U., ... & Gaines, S. D. (2018). Rapid and lasting gains from solving *illegal fishing*. *Nature ecology & evolution*, 2(4), 650.
- Chalk, P. (2002). Threats to the Maritime Environment: Piracy and Terrorism. RAND Stakeholder Consultation, held in Ispra, Italy on

- October, 28-30.
- Chalk, P., Rabasa, A., Rosenau, W., & Piggott, L. (2009). *The evolving terrorist threat to Southeast Asia: A net assessment*. Rand Corporation.
- Chapman, N. W. (2017). Mechanisms of Vietnam's Multidirectional Foreign Policy. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 36(2), 31-69.
- Chapsos, I. (2016a). *Is Maritime Security a Traditional Security Challenge?* In A. J. Masys (Ed.), *Exploring The Security Landscape: Non-Traditional Security Challenges*, Advanced Sciences and Technologies (p. 59). Springer International Publishing Switzerland.
- Chapsos, I. (2016b). *Is Maritime Security a Traditional Security Challenge?* (A. J. Masys, Ed.) (Exploring). Springer International Publishing Switzerland.
- Chapsos, I., & Malcolm, J. A. (2017). *Maritime security in Indonesia: Towards a comprehensive agenda?* *Marine Policy*, 76(September 2015), 178-184.
- Chatterjee, A. (2014). *Non-traditional Maritime Security Threats in the Indian Ocean Region*. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 10(2), 77-95.
- Chen, J., Gleason, A., Nabbs-Keller, G., Sambhi, N., Springer, K., & Tanu, D. (2014). *New Perspectives ON INDONESIA*.
- Chu, V.C. (2004). Qua trình doi moi tu duy doi ngoai va hinh thanh duong loi doi ngoai moi [Renew Thinking About Foreign Affairs and Reformulation of Foreign Policy]. *Nghien Cuu Quoc Te*, 3(58), 3-11.

- Chung, C. (2016): 'Drawing the U-Shaped Line: China's Claim in the South China Sea, 1946-1974.' *Modern China*, vol. 42, no. 1: 39.
- Cribb, R. B., & Ford, M. (Eds.). (2009). Indonesia beyond the water's edge: managing an archipelagic state. Institute of Southeast Asian Studies.: 49-58
- Connelly, A. L. (2015). *Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges*. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International & Strategic Affairs, 37(1), 1-28.
- Connelly, A. L. (2017). *Indonesia di Laut Cina Selatan : Berjalan sendiri*, (April).
- Dabova, E. L. (2013). *Non-traditional security threats in the border areas: Terrorism, piracy, environmental degradation in southeast Asian maritime domain*. *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences-ISPRS Archives*, 40(4W3), 51-56.
- Dang, T. N. (2012). Fisheries Co-operation in the South China Sea and the (Ir) relevance of the Sovereignty Question. *Asian Journal of International Law*, 2(1), 59-88.
- Darmawan, A. B., & Ndadari, G. L. (2017). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Cina Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1).
- Darmawan, A. B., & Mahendra, L. (2018). Isu Laut Cina Selatan: Negara-negara ASEAN Terbelah Menghadapi Cina. *Jurnal Global & Strategis*, 12(1), 79-100.
- Djalal, H. (2006). *The Emergence of the Concept of Fishing Entities: A Note*. *Ocean Development & International Law*, 37(2), 117-121.
- Djalal, H. (2012). *Indonesia's maritime challenges and priorities*.

- Bateman, WSG, Bateman, S., & Ho, J. (2012). Maritime.
- Dodds, K. (2001). *Political geography III: critical geopolitics after ten years*. Progress in Human Geography, 25(3), 469-484.
- Dodds, K. (2015). *Fish and Continental Shelves: Maritime Security, Sovereignty, and Stewardship in the Polar Regions*. Brown Journal of World Affairs, xxii(I), 1-22.
- Douglas, J., "Drawn into the Fray: Indonesia's Natuna Islands Meet China's Long Gaze South", *Asian Affairs* 42, No 3 (1994), 154-155.
- Farrell, T. (2002) 'Constructivist security studies: Portrait of a research program', *International Studies Review* 4, 1 : 71-92.
- Fealy, G., & White, H. (2016). *Indonesia's "Great Power" Aspirations: A Critical View*. Asia & the Pacific Policy Studies, 3(1), 92-100.
- Fine, G. A. (1995). *A second Chicago school?: The development of a postwar American sociology*. University of Chicago Press.
- Florini, A. (1996). *The Evolution of International Norms*. *International Studies Quarterly*, 40(3), 363.
- Funge-Smith, Simon, Matthew Briggs and Weimin Miao. 2012. Regional overview of fisheries and aquaculture in Asia and the Pacific (Food and Agriculture Organization of the United Nations).
- Furtado, X. (1999). *International law and the Dispute over the Spratly Islands : Whither UNCLOS?* Contemporary Southeast Asia, 21(3), 386.
- Gindarsah, I., & Priamarizki, A. (2015). *Indonesia's Maritime Doctrine and Security Concerns*. RSiS Nanyang Technology University, (April), 15.
- Gao, Z., & Jia, B. B. (2013). The nine-dash line in the South China Sea:

- History, status, and implications. *American Journal of International Law*, 107(1), 98-123.
- Hamzah, B. B. A. (2015). *Sinking the Ships : Indonesia ' s Foreign Policy under Jokowi*. RSIS Commentary, (16).
- Heazle, M., & Butcher, J. G. (2007). *Fisheries depletion and the state in Indonesia: Towards a regional regulatory regime*. *Marine Policy*, 31(3), 276-286.
- Hikmah, M. (2013). *Illegal fishing In Indonesia From The National and The International Law Perspectives*. *Indonesian Journal of International Law*, 11(1), 1-29.
- Holsti, K. J. (1970). *National Role Conceptions in the Study Role Conceptions National of Foreign Policy*. *International Studies Quarterly*, 14(3), 233-309.
- Hongzhou, B. Z. (2015). *Indonesia ' s War on Illegal fishing : Impact on Cina*, (192), 2013-2015.
- Hua, Z. H. A. N. G. (2016). On the Legal Obligation and Prospect of Cooperation between Parties Involved in the Disputes on South China Sea. *Pacific Journal*, 1, 002.
- Hudson, V. M. (2005). Foreign policy analysis: actor-specific theory and the ground of international relations. *Foreign Policy Analysis*, 1(1), 1-30.
- Jervis, Robert (1976). Perception and Misperception in International Politics. *Princeton University Pres*, 13.
- Juda, Lawrence . 2001. "The United Nations Fish Stocks Agreement" di dalam Helge Ole Bergesen and et al (eds), *Yearbook of International Co-operation on Environment and Development 2001/2002* (Earthscan Publications).

- Juda, Lawrence, (2002) 'Rio plus ten: the evolution of international marine fisheries governance' (2002) 33(2) *Ocean Development & International Law* 109, 119.
- Kantaprawira, R., Bainus, A., & Kusumawardhana, I. (2018). The unbreakable relations between Indonesia-Vietnam post" Sink the Vessels" policy: a complex systems Approach. *Journal of ASEAN Studies*, 6(2), 155-178.
- Keliat, M. (2009). Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(Juli), 19.
- Keohane, R. (1988). *International institutions: Two approaches*. *International Studies Quarterly*, 32(4), 379-396.
- Kusumawardhana, I., Haridha, F., & Ma'sumah, I. Garuda in Southeast Asia's Contested Waters: Indonesia dan Dinamika Keamanan Maritim Asia Tenggara. *Indonesian Perspective*, 5(1).
- Lan Anh, N. (2016). UNCLOS and maritime security in the South China Sea. In C. Jenner & T. Thuy (Eds.), *The South China Sea: A Crucible of Regional Cooperation or Conflict-making Sovereignty Claims?* (pp. 171-185). Cambridge: Cambridge University Press.
- Lanteigne, M. (2008): 'China's Maritime Security and the "Malacca Dilemma."' *Asian Security*, vol. 4, no. 2: 145.
- Laksmiana, E. A., & Supriyanto, R. A. (2018). Abandoned at Sea: The Tribunal Ruling and Indonesia's Missing Archipelagic Foreign Policy. *Asian Politics & Policy*, 10(2), 300-321.
- Laksmiana, E. A. (2011). The enduring strategic trinity: explaining Indonesia's geopolitical architecture. *Journal of the Indian Ocean Region*, 7(1), 95-116.
- Li, J., & Amer, R. (2015). Closing the net Against *IUU Fishing* in the

- South China Sea: China's practice and way forward. *Journal of International Wildlife Law & Policy*, 18(2), 139-164.
- Liss, C. (2014). The privatisation of maritime security in Southeast Asia: the impact on regional security cooperation. *Australian Journal of International Affairs*, 68(2), 194-209.
- Liss, C. (2013). New Actors and the State: Addressing Maritime Security Threats in Southeast Asia. *Contemporary Southeast Asia*, 141-162.
- Liow, J. C. (2018). The South China Sea Disputes: Some Blindspots and Misperceptions. In *International Relations and Asia's Southern Tier* (pp. 159-171). Springer, Singapore.
- Madanayaka, K. (2015). *Illegal fishing Issue as a Non-traditional Security Threat to Sri Lanka* (With Reference to India), (November), 72-78.
- Mandel, R. (1984). *The desirability of irrationality in foreign policy making: A preliminary theoretical analysis*. *Political Psychology*, 643-660.
- Mearsheimer, J. J. (2007). Structural realism. *International relations theories: Discipline and diversity*, 83.
- Morgenthau, H. J. (1948). The problem of sovereignty reconsidered. *Columbia Law Review*, 48(3), 341-365.
- Nainggolan, P. P. (2015). *Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya*. *Politica*, 6(2), 167-190.
- Negara, S., & Das, S. (2017). *Challenges for Indonesia to achieve its Maritime Connectivity Plan and Leverage on Regional Initiatives*. *ISEAS*, (3), 1-11.
- Nugraha, M. H. R., & Sudirman, A. (2016). Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal*

- Wacana Politik, 1(2).
- Nguyen, D.N. (2005). Chinh Sach Va Hoat Dong Doi Ngoai Trong Thoi Ky Doi Moi [Foreign Policy and Activities in the Period of Doi Moi]. *Tap Chi Cong San*, 17(740), 31–37.
- Pattiradjawane, R. (2015). *South Cina Sea Disputes: Sovereignty and Indonesian Foreign Policy*. RSIS Commentary, (116).
- Pattiradjawane, R. L. (2017). South China Sea Disputes: Sovereignty and Indonesian Foreign Policy. In *The South China Sea Disputes: Flashpoints, Turning Points and Trajectories* (hal. 319-323).
- Pedrasan, R., Kurniawan, Y., & Purwasandi. (2016). *Handling of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Rodou*. *Jurnal Pertahanan*, 2(1), 13–26.
- Phan, D.N. (2006). Ngoai Giao Viet Nam Sau 20 Nam Doi Moi [Vietnam's Foreign Relations After 20 Years of Renovation]. *Tap Chi Cong San*, 14(760), 26–30.
- Pradhan, S. (2016). *Cina's Maritime Silk Route and Indonesia's Global Maritime Fulcrum: Complements and Contradictions*. *Institute of Chinese Studies*, (12), 1–18.
- Price, R. (1994). *Interpretation and disciplinary orthodoxy in international relations*. *Review of International Studies*, 20(2), 201–204.
- Rahman, C. (2009). Concepts of maritime security: A strategic perspective on alternative visions for good order and security at sea, with policy implications for New Zealand.
- Ramadhani, M. A. (2015). An Indonesian Perspective toward Maritime Vision: Is Pursuing National Interest while Maintaining Neutrality in the South China Sea Possible?. *European Scientific Journal*, ESJ, 11(10).

- Reveron, D. S. (2016). *Maritime Security Deficits and International Cooperation Illegal fishing, Piracy, and Maritime Security Deficits in Southeast Asia*. Georgetown Journal of Asian Affairs, (31).
- Richards, D. (1996). *Elite interviewing: Approaches and pitfalls*. *Politics*, 16 (3), 199-204.
- Riddle, K., (2007). 'Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing: Is International Cooperation Contagious?' (2007) 37 *Ocean Development & International Law* , 269
- Riska, E. (2017). Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal fishing*) oleh Nelayan Cina di ZEE Perairan Kepulauan Natuna. *Diplomasi Pertahanan*, 3(2).
- Roach, J. A. (2004). Initiatives to enhance maritime security at sea. *Marine Policy*, 28(1), 41-66.
- Robertua, V., & Sinaga, O. (2018). Indonesia in the South China Sea Dispute: Humble-Hard Power. *Jurnal Global & Strategis*, 11(2), 73-83.
- Rohingati, S. (2014). *Penenggelaman Kapal Ikan Asing : Upaya Penegakan Hukum Laut Indonesia*. DPR, VI(24).
- Rosenberg, D., & Chung, C. (2008). Maritime security in the South China Sea: coordinating coastal and user state priorities. *Ocean Development & International Law*, 39(1), 51-68.
- Rosyidin, M. (2012). *Globalisasi dan Paradoks Kepentingan Nasional: Million Friends Zero Enemy*. In Analisis CSIS Vol. 41 No. 3, September 2012 (p. 414). CSIS.
- Rosyidin, M. (2017). *Foreign policy in changing global politics: Indonesia's foreign policy and the quest for major power status in the Asian Century*. South East Asia Research, 0967828X1770657.

- Ronzitti, N. (Ed.). (1990). Maritime terrorism and international law (Vol. 6). Martinus Nijhoff Publishers.
- Ruggie, J. G. (1997). Consolidating the European pillar: The key to NATO's future. *Washington Quarterly*, 20(1), 109-124.
- Ruggie, J. G. (2017). Multinationals as global institution: Power, authority and relative autonomy. *Regulation & Governance*.
- Russett, B. M. (1967). International regions and the international system. Greenwood Press.
- Sambhi, N. (2015). *Jokowi 's "Global Maritime Axis ": Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead? Security Challenges*, 11(2), 39-55.
- Sebastian, L. C., Supriyanto, R. A., & Arsana, I. M. A. (2014). Indonesia and the Law of the Sea: Beyond the archipelagic outlook. *INDONESIA AT HOME AND ABROAD*, 67.
- Sodik, D. M. (2009). *Analysis of IUU Fishing in Indonesia for the Reform of Fisheries Legislative and Institutional Frameworks*. *Ocean Yearbook Online*, 23(1), 309-344.
- Sodik, D. M. (2009). *IUU Fishing and Indonesia's Legal Framework for Vessel Registration and Fishing Vessel Licensing*. *Ocean Development and International Law*, 40(3), 249-267.
- Suryadinata, Leo (1991). Indonesia-Vietnam Relations Under Soeharto. *Contemporary Southeast Asia*, 331-346.
- Supriyanto, R. A. (2017). Indonesia's Natuna Islands: Next Flashpoint in the South China Sea?. In *The South China Sea Disputes: Flashpoints, Turning Points and Trajectories* (pp. 315-318).
- Syailendra, E. A. (2017). A Nonbalancing Act: Explaining Indonesia's Failure to Balance Against the Chinese Threat. *Asian Security*, 13(3), 237-255.

- Taliaferro, J. W. (2001). Security seeking under anarchy: Defensive realism revisited. *International security*, 25(3), 128-161.
- Thai, V. V. (2009). Effective maritime security: conceptual model and empirical evidence. *Maritime Policy & Management*, 36(2), 147-163.
- Thayer, C.A. (2008). *Upholding state sovereignty through global integration: The remaking of Vietnamese national security policy*. Paper to conference Vietnam, East Asia and Beyond, City University of Hong Kong, Hong Kong, 11–12 December.
- Thayer, C. A. (2012). ASEAN'S Code of Conduct in the South China Sea: A Litmus Test for Community-Building?. *The Asia-Pacific Journal*, 10(34), 20-26.
- Thayer, C. A. (2013). ASEAN, China and the code of conduct in the South China Sea. *SAIS Review of International Affairs*, 33(2), 75-84. Dapat diakses secara online di <https://apjif.org/2012/10/34/Carlyle-A-Thayer/3813/article.html>.
- Thayer, C. A. (2015). "South China Sea Tension: China, the Claimant States, ASEAN, and the Major Powers. Di Dalam Amer, R., Batongbacal, J., Beckman, R., Chalermphanupap, T., Dang, T. N., Dung, P. L., ... & Rothwell, D. R. (2015). *Power, law, and maritime order in the South China Sea*. Lexington Books.
- Thayer, C. (2016a). China's naval modernization and US strategic rebalancing: Implications for stability in the South China Sea. In C. Jenner & T. Thuy (Eds.), *The South China Sea: A Crucible of Regional Cooperation or Conflict-making Sovereignty Claims?* (pp. 223-240). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139963084.014
- Thayer, C. A. (2016b). Vietnam's Strategy of 'Cooperating and

- Struggling'with China over Maritime Disputes in the South China Sea. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 3(2), 200-220.
- Thayer, C. A. (2017). Vietnam's Foreign Policy in an Era of Rising Sino-US Competition and Increasing Domestic Political Influence. *Asian Security*, 13(3), 183-199.
- Tønnesson, S. (2016). The Tonkin Gulf Agreements: A model of conflict resolution? In C. Jenner & T. Thuy (Eds.), *The South China Sea: A Crucible of Regional Cooperation or Conflict-making Sovereignty Claims?* (pp. 151-170). Cambridge: Cambridge University Press.
- Turcsányi, R. Q. (2017). *Chinese Assertiveness in the South China Sea: Power Sources, Domestic Politics, and Reactive Foreign Policy*. Springer.
- Onuf, N., & Klink, F. F. (1989). *Anarchy, authority, rule*. *International Studies Quarterly*, 33(2), 149-173.
- Vreÿ, F. (2010). African maritime security: a time for good order at sea. *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, 2(4), 121-132.
- Vreÿ, F. (2013). Turning the tide: revisiting African maritime security. *Scientia Militaria: South African Journal of Military Studies*, 41(2), 1-23.
- Wang, F. (2005): 'Preservation, Prosperity and Power: What Motivates China's Foreign Policy?' *Journal of Contemporary China*, vol. 14, no. 45, pp. 669-694.
- Wang, K. H. (2016). Making dangerous ground safe: the role of Taiping Island. *Prospect Journal*, (15), 115-139.
- Wang, Y., & Minzner, C. (2015). The rise of the Chinese security state. *China Quarterly*: 1-21.

- Weatherbee, D. E. (2016). *Re-Assessing Indonesia's Role in the South China Sea*. ISEAS, (18), 1-13.
- Wendt, A. (1992). *Anarchy is what states make of it: the social construction of international politics*. *International Organization*, 46(2), 391-425. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2706858>.
- Wendt, A. (1995). *Constructing international politics*. *International Security*, 20(1), 71-81.
- Wicaksana, I. W. (2009). The Constructivist Approach Towards Foreign Policy Analysis. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 1.
- Wu, S., & Zou, K. (2009). Maritime security in the South China Sea: cooperation and implications. *Maritime security in the South China Sea: Regional implications and international cooperation*, 3-12.
- Wu, S., & Zou, K. (Eds.). (2013). *Securing the Safety of Navigation in East Asia: Legal and Political Dimensions*. Elsevier.
- Wuryandari, G. (2013). Prospek Hubungan Indonesia-Cina. In L. C. Sinaga, *Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara* (p. 153). Jakarta: LIPI Press.
- Zhang, Z. (2011). China's energy security, the Malacca dilemma and responses. *Energy policy*, 39(12), 7612-7615.
- X. Zhang & B. Hu, (2013). *Cooperation on Fishery Development in the South China Sea: In the Perspective of International Law*, 31 HUMANITIES & SOC. SCI. J. HAINAN U. 7, 8.
- Yoshimatsu, H. (2017). China, Japan and the South China Sea Dispute: Pursuing Strategic Goals Through Economic and Institutional Means. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 4(3), 294-315.

- Zhang, H. (2018). Fisheries cooperation in the South China Sea: Evaluating the options. *Marine Policy*, 89, 67-76.
- Zhang, H. (2016). Chinese fishermen in disputed waters: Not quite a “people's war”. *Marine Policy*, 68, 65-73.
- Keyuan, Z. (2005). The Sino-Vietnamese agreement on maritime boundary delimitation in the Gulf of Tonkin. *Ocean Development & International Law*, 36(1), 13-24.

3. Disertasi

- Amri, A. A. (2016). Maritime Security Challenges in Southeast Asia: Analysis of International and Regional Legal Frameworks.
- Shaohua, M. (2006). China's multilateralism and the South China sea conflict: Quest for hegemonic stability (Doctoral dissertation). Dapat diakses di <http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/15352>.
- Kusumawardhana, I. (2019). Respons Indonesia Terhadap Vietnam dan Cina dalam Menghadapi Kontestasi Keamanan Maritim di Perairan Natuna Terkait Potensi *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* pada Era Presiden Joko W (Doctoral Dissertation).

4. Sumber Online

- Abuza, Z & Anh.N.N. (2016). Vietnam's Military Modernization. Diakses secara daring di halaman <https://thediplomat.com/2016/10/vietnams-military-modernization/>.
- ABS-CBN News. Gov't eyes 'shame campaign' to stop *illegal fishing* (2017). Dapat diakses di alamat berikut: {<http://news.abs->

- cbn.com/news/01/18/17/govt-eyes-shamecampaign-to-stop-illegal-fishing) (terakhir akses 23 Maret 2017).
- Al birra, F. (2017). Hiu Macan Tangkap 13 Kapal Vietnam di Laut Natuna-JawaPos.com. Retrieved May 8, 2017, from <http://www.jawapos.com/read/2017/03/24/118350/hiu-macan-tangkap-13-kapal-vietnam-di-laut-natuna>.
- Amindoni, A. (2015). Indonesia sinks 106 foreign boats-National-The Jakarta Post. Retrieved May 13, 2017, from <http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/30/indonesia-sinks-106-foreign-boats.html>
- Anjaiah, V (2011), Growing Strategic Ties Between Vietnam, Indonesia-Analysis, *Eurasiareview*, 7 August, online: <<https://www.eurasiareview.com/21082017-growing-strategic-ties-between-vietnam-indonesia-analysis/>> (3 January 2018)
- Association of Southeast Asian Nations, “Statement by the ASEAN Foreign Ministers on the Recent Developments in the South China Sea,” Maret 18, 1995. <http://www.aseansec.org/2089.htm>
- Association of Southeast Asian Nations, “Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea,” Point 10, November 4, 2002. <http://www.aseansec.org/13163.htm>
- Association of Southeast Asian Nations, 2012. “Post Declaration on the conduct of parties in South China Sea”, http://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2
- Australia Department of Immigration and Border Protection, Asylum Trends, 2012-2013 Annual Publication, 4. Dapat diakses pada halaman

<https://www.homeaffairs.gov.au/ReportsandPublications/Documents/statistics/asylum-trends-aus-2012-13.pdf>. Terakhir akses pada 04 Agustus 2018.

Aziza, 2017. "Luhut Pastikan Tak Ada Perubahan nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara". Diakses secara online di alamat <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/13/193437026/luhut-pastikan-tak-ada-pengubahan-nama-laut-china-selatan-menjadi-laut-> Terakhir akses 20 Juli 2018. Terakhir akses 04 September 2018.

Basilio, E. F., (2012). "Why there Was No ASEAN Joint Communiqué," Republic of the Philippines, Department of Foreign Affairs, Public Information Services Unit, July 19, 2012. Dapat diakses di <http://www.officialgazette.gov.ph/2012/07/18/why-there-was-no-asean-joint-communicue/>. Terakhir akses 2 Juli 2018.

Berlianto, 2017. "China Tuntut Indonesia Batalkan Penamaan Laut Natuna Utara". <https://international.sindonews.com/read/1236125/40/china-tuntut-indonesia-batalkan-penamaan-laut-natuna-utara-1504375223>. Diakses 20 Juli 2018.

Bitzinger, R. 2015. "China's Double-Digit Defense Growth." *Foreign Affairs*. Dapat diakses secara online pada alamat <https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2015-03-19/chinas-double-digit-defense-growth>. Terakhir akses 19 Maret 2018.

Brummitt, C, 2015. "Desperate for Investment, Indonesia Plays China vs Japan [Benar-benar Butuh Investasi: Indonesia Mengadu Cina dengan Jepang]", Bloomberg, 20 Mei 2015, <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-19/desperate-for->

- [investment-indonesia-plays-china-vs-japan](#). Terakhir akses 19 Maret 2018.
- Brummitt, C. (2016). “Frantic Phone Call Failed to Halt China-Indonesia Sea Spat”, Bloomberg, 23 March 2016, <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-22/frantic-phone-call-failed-to-contain-china-indonesia-sea-spat>. Interviews with Indonesian officials, April 2016.
- Brummitt, C. (2016). “Indonesia Will Defend South China Sea Territory with F-16 Fighter Jets”, Bloomberg, 1 April 2016, <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-31/indonesia-to-deploy-f-16s-to-guard-its-south-china-sea-territory>.
- Burhani, R. 2015. “Susi: “*Illegal fishing*” musuh dunia.” Antara News. Januari 09. Accessed Oktober 10, 2017. <http://www.antaraneews.com/berita/473225/susi-illegal-fishing-musuhdunia>.
- Chase, M. S. (2010). Capabilities and implications of China’s jiaolong submersible. China Brief, 19. Dapat diakses pada halaman http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D%2F437197&cHash%2F419169e46c7#.VwdXAVmLTIU. Terakhir akses 9 Juli 2018.
- Chapter Six: Regional Maritime Security Initiatives* | IISS. (n.d.). Retrieved June 28, 2017, from <https://www.iiss.org/en/publications/strategic-dossiers/issues/asia-pacific-regional-security-assessment-2016-2288/rsa16-08-chapter-6-9273>
- Chubb, A, 2014. “*Exploring China’s “Maritime Consciousness”: Public Opinion on the South and East China Sea Disputes*”. Perth: US Asia

- Center. Diakses secara online pada alamat http://perthusasia.edu.au/usac/assets/media/docs/publications/2014_Exploring_Chinas_Maritime_Consciousness_Final.pdf. Terakhir akses 04 September 2018.
- Cochrane, J. (2016). Indonesia confirms seizing fishing boat in South China Sea, defying Beijing. NY Times. Dapat diakses pada halaman <http://www.nytimes.com/2016/06/21/world/asia/indonesia-south-china-sea-fishing.html>.
- Correlates of War Project, 2016. “*National Material Capabilities (v4.0)*” Dapat diakses secara online pada alamat <http://cow.dss.ucdavis.edu/data-sets/national-material-capabilities>. Terakhir akses 04 September 2018.
- CSIS, 2016. “*Asia Maritime Transparency Initiative: A Freedom of Navigation Primer for the Spratly Islands*”. Dapat diakses secara online pada halaman <https://amti.csis.org/fo-nops-primer/>. Terakhir akses 04 September 2018.
- Dai, B. (2010): ‘Stick to the Path of Peaceful Development.’ *China Daily*, 13 December 2010. Dapat diakses secara online pada alamat http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2010-12/13/content_11690133.htm. Terakhir akses 04 September 2018.
- Department of Defense. (2015). Annual report to Congress, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China. Dapat diakses pada halaman https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2017_China_Military_Power_Report.PDF. Terakhir akses 9 Juli 2018.
- Department of Fisheries Malaysia, Malaysia’s National Plan of action to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated

- fishing (Malaysia's NPOAIUU), (2013), Putrajaya: Department of Fisheries Malaysia.
- DetikFinance. 2014. "2007-2012, RI Sudah Tenggelamkan 38 Kapal Asing Ilegal." detikFinance. Desember 04. Accessed Juni 09, 2017. <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2767817/>.
- DetikFinance. 2014. "Ini Pidato Lengkap Susi yang Bikin Ribuan Undangan Setijab Tepuk Tangan Meriah." detikFinance. Oktober 29. Accessed Juni 09, 2017. <https://finance.detik.com/ekonomibisnis/2733134/ini-pidato-lengkap-susi-yang-bikin-ribuanundangan-sertijab-tepuk-tangan-meriah>.
- Dikshit, S (2011). India, Vietnam plan big push to ties. Dapat diakses secara online di halaman <https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/india-vietnam-plan-big-push-to-ties/article2529788.ece>. Terakhir akses 03 Juli 2018.
- Djumala, D. (2014). Ketika Diplomasi Membumi-Kompas.com. dikutip pada 13, Mei 2017, dari halaman <http://internasional.kompas.com/read/2014/11/15/05320031/Ketika.Diplomasi.Membumi>
- Doulman, J. (2002), 'Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: Mandate for an International Plan of Action' (FAO, 2000) <http://www.fao.org/docrep/005/v3274e/v3274e06.htm> at 28 October 2015.
- Food&Agric. Org. of the United Nations, Food and Nutrition in Numbers 56, 134, 159, 185, 233 (2014), available at <http://www.fao.org/3/a-i4175e.pdf>.
- Foreign policy (2016). Fishing Disputes Could Spark A South China Sea Crisis. Dapat diakses pada halaman

<http://foreignpolicy.com/2016/04/07/fishing-disputes-could-spark-a-south-china-sea-crisis/>. (Terakhir diakses 4 April 2018).

Gao, C, 2018. "China: Ties With Cambodia Have Become 'Model of Country-to-Country Relations'". Dapat di akses pada halaman <https://thediplomat.com/2018/01/china-ties-with-cambodia-have-become-model-of-country-to-country-relations/>

Groll, E & De Luce, D. (2016). China Is Fueling a Submarine Arms Race in the Asia-Pacific. Di akses pada 03 Juli 2018 di halaman <https://foreignpolicy.com/2016/08/26/china-is-fueling-a-submarine-arms-race-in-the-asia-pacific/>

Heibert, M & Nguyen, P (2015), Vietnam Ramps Up Defense Spending, But Its Challenges Remain, dapat diakses di <https://amti.csis.org/vietnam-ramps-up-defense-spending-but-its-challenges-remain/>.

ICC-IMB, Piracy and Armed Robbery against Ships: Annual Report (International Maritime Bureau, 1 January-31 December 2003)

ICC-IMB, Piracy and Armed Robbery against Ships: Annual Report (International Maritime Bureau, 1 January-31 December 2014)

Indonesia eyes seat on UN Security Council-World-The Jakarta Post. (2015). Retrieved May 13, 2017, from <http://www.thejakartapost.com/news/2015/09/30/indonesia-eyes-seat-un-security-council.html>

Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia-Presiden Republik Indonesia. (2015).

Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia-Presiden Republik Indonesia. (2015). Retrieved May 8, 2017, from <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim->

[dunia.html](#)

- Irawan, Y. K. (2016a). Pangarmabar: Laut Natuna Rawan Kejahatan Perairan-Kompas.com. Retrieved May 8, 2017, from <http://regional.kompas.com/read/2016/01/07/15463041/Pangarmabar.Laut.Natuna.Rawan.Kejahatan.Perairan>.
- Irawan, Y. K. (2016b). Pangarmabar: Laut Natuna Rawan Kejahatan Perairan-Kompas.com. Retrieved May 8, 2017, from <http://regional.kompas.com/read/2016/01/07/15463041/Pangarmabar.Laut.Natuna.Rawan.Kejahatan.Perairan>.
- Jakarta Globe, (2014). Indonesia Declares War on Illegal Foreign Fishing Boats. Dapat diakses pada halaman <http://jakartaglobe.id/news/indonesia-declares-war-illegal-foreign-fishing-boats/>. Terakhir akses 6 Juli 2018.
- Jennings, R. (2016). Vietnam Is Challenging China's Control Of The Disputed South China Sea. Dapat diakses pada halaman <https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2016/11/28/a-resilient-mini-me-rival-is-challenging-chinas-control-of-a-disputed-sea/#21185f302d67>. Terakhir akses 21 Januari 2019.
- Juwana, H. (2016, March 30). Sembilan Garis Putus Cina. Retrieved from print.kompas: <http://print.kompas.com/baca/2016/03/30/Sembilan-Garis-Putus-Cina>.
- Kinerja Presiden Jokowi: Evaluasi Publik Nasional Setahun Terpilih Me.... (2015). Retrieved May 13, 2017, from <https://www.slideshare.net/saidi-manahmad/print-setahun-jokowi-rev>
- KL “out of patience” after Indonesia protests. (2010). Retrieved May 13, 2017, from <https://www.malaysiakini.com/news/141087>
- KKP News. 2016. “Cegah *Illegal fishing* Indonesia-Australia Patroli

- Bersama di Perbatasan.” KKP News. November 04. Accessed Oktober 10, 2017. <http://news.kkp.go.id/index.php/cegah-illegal-fishing-indonesia-australia-patroli-bersama-diperbatasan/>.
- KKP News. 2017. “Indonesia-Norwegia Bersinergi Perangi Praktik *Illegal fishing*.” KKP News. Juni 08. Accessed Oktober 10, 2017. <http://news.kkp.go.id/index.php/indonesia-norwegia-bersinergiperangi-praktik-illegal-fishing/>.
- KKP News, 2015. “Tanpa Peran Masyarakat dan Media, Menteri Susi: Kami Tidak Bisa Berantas *Illegal fishing*.” KKP News. November 22. Accessed Oktober 10, 2017. <http://news.kkp.go.id/index.php/tanpa-peran-masyarakat-dan-media-menteri-susi-kami-tidakbisa-berantas-illegal-fishing/>.
- Raditio, K. H., “Indonesia ‘Speaks Chinese’ in South China Sea”, *The Jakarta Post*, 18 July 2016, <http://www.thejakartapost.com/academia/2016/07/18/indonesia-speaks-chinesein-south-china-sea.html>. Terakhir diakses 4 April 2018.
- Kompas.com. (2009). Perairan Natuna Paling Rawan Pencurian Ikan oleh Kapal Asing-Kompas.com. Retrieved May 12, 2017, from <http://regional.kompas.com/read/2009/06/24/19111853/perairan.natuna.paling.rawan.pencurian.ikan.oleh.kapal.asing/>
- Kronologi Malaysia Tangkap 3 Petugas KKP RI. (2010). Retrieved May 13, 2017, from <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/171206-ini-kronologis-penangkapan-petugas-dkp>
- Kusumadewi, A. (2016). Rapat di Atas Kapal Perang di Natuna, Jokowi Gertak Cina. Retrieved May 8, 2017, from

- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623091859-20-140309/rapat-di-atas-kapal-perang-di-natuna-jokowi-gertak-Cina/>
- Kuwado, F. J. (2017). Lagi, 81 Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan di Penjuru Indonesia-Kompas.com. Retrieved May 10, 2017, from http://nasional.kompas.com/read/2017/04/01/12003881/lagi.81.kapal_pencuri.ikan.ditenggelamkan.di.penjuru.indonesia
- Luu et al, 2017. Beijing Criticizes Indonesia renaming part of South China Sea [Online]. <http://edition.cnn.com/2017/07/15/asia/indonesia-south-china-sea-territorial-claims/index.html> . [diakses 20 Oktober 2017].
- Marta, M. F. 2017. “Susi dan Tiga Pilar yang Tak Sekadar Mitos`.” *Kompas*. September 07. Accessed Oktober 10, 2017. <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/07/051546726/susi-dan-tiga-pilar-yang-tak-sekadar-mitos>.
- Martin, M. (2014, Maret 4). China withholds full domestic-security spending figure. Reuters. Diakses secara online pada alamat <http://www.reuters.com/article/us-china-parliament-security-idUSBREA240B720140305>. Terakhir akses 04 September 2018
- Malaysia NPOA-IUU, 2013. Dapat diakses secara online pada halaman berikut
https://www.dof.gov.my/dof2/resources/user_1/UploadFile/Penerbitan/Senarai%20Penerbitan/Malaysia_NPOA_IUU.pdf. Terakhir diakses pada 4 Mei 2018.
- Menkopollhukam Bela Kebijakan Jokowi Tenggelamkan Kapal Ilegal. (2014). Retrieved June 4, 2017, from <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141129064351-20-14664/menkopollhukam-bela-kebijakan-jokowi-tenggelamkan-kapal>

[illegal/](#).

Mentlu RI protes aksi kapal penjaga pantai Cina di wilayah Indonesia-BBC Indonesia. (2016). Retrieved May 8, 2017, from http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160321_in_donesia_kemlu_kapal_cina.

Menteri Susi Kembali Tenggelamkan 60 Kapal Ikan Ilegal. (2016). Retrieved June 4, 2017, from <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/17/063796704/menteri-susi-kembali-tenggelamkan-60-kapal-ikan-ilegal>.

Menteri Susi Ungkap Buruknya Praktik Pencurian Ikan di Indonesia-Bisnis Liputan6.com. (2015). Retrieved May 10, 2017, from <http://bisnis.liputan6.com/read/2387745/menteri-susi-ungkap-buruknya-praktik-pencurian-ikan-di-indonesia>.

Ministry of National Defence. (2009). *Vietnam National Defence*. Diakses dari <http://aseanregionalforum.asean.org/files/library/ARFDefenseWhitePapers/Vietnam-2009.pdf>. Diakses 04 September 2018

Preamble To The United Nations Convention On The Law Of The Sea. (n.d.). Diakses pada 04 September 2018, dari http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part4.htm

Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. 2016. "Menteri Susi: Saya Beruntung Punya Presiden yang Mendukung Penuh Pemberantasan "Illegal fishing"." Kompas. November 09. Diakses 10 Oktober 2017. Pada halaman <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/09/12495771/menteri.susi.saya.beruntung.punya.presiden.yang.mendukung.penuh.pemberanta>

[san.illegal.fishing.](#)

Mulvenon, J. (2011). Chairman Hu and the PLA's "New Historic Missions". China Leadership Monitor, No. 27, Hoover Institute. <http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/CLM27JM.pdf>. Terakhir akses 8 Juli 2018.

Office of the Secretary of Defense (OSD), (2012). Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2011, A Report to Congress Pursuant to the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2000 (Washington, 2012). Dapat diakses di <https://www.globalsecurity.org/military/library/report/2012/2012-prc-military-security.htm>. Terakhir akses 03 Juli 2018.

Whitehouse.gov, 2013. "*Remarks by President Obama and President Xi Jinping of the People's Republic of China After Bilateral Meeting*". Dapat diakses secara online pada alamat <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/06/08/remarks-president-obama-and-president-xi-jinping-peoples-republic-china->. Terakhir akses 04 September 2018.

Panda, A, 2014. "Reflecting on China's Five Principles, 60 Years Later". Sumber online: <https://thediplomat.com/2014/06/reflecting-on-chinas-five-principles-60-years-later/>. Terakhir akses 2 September 2018. Lihat juga. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China (2016): *China's Initiation of the Five Principles of Peaceful Co-Existence* [online].

Panglima TNI Cek Pelanggaran Kedaulatan Negara Oleh Perusahaan Malaysia di Anambas dan Natuna-Tribunnews.com. (2017). Diakses pada 8, 2017, dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/07/panglima-tni-cek->

[pelanggaran-kedaulatan-negara-oleh-perusahaan-malaysia-dianambas-dan-natuna](#)

Phillips, T., Holmes, O., & Bowcott, O. (2016, July 12). Beijing rejects tribunal's ruling in South China Sea case. *Guardian*. Diakses pada 8, 2017, dari

<https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/philippines-wins-south-china-sea-case-against-china>.

Pidato Presiden RI mengenai Dinamika Hubungan Indonesia-Malaysia, 1 September 2010 | Sekretariat Negara. (2010). Retrieved May 13, 2017, from

http://www.setneg.someah.id/baca/index/pidato_presiden_ri_mengenai_dinamika_hubungan_indonesia_-_malaysia_1_september_2010.

Pratomo, H. B., 2017. Pemerintah Ganti Nama Laut China Selatan jadi Laut Natuna Utara [Online].

<https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-ganti-nama-laut-chinaselatan-jadi-laut-natuna-utara.html>. [diakses 20 Oktober 2017].

Presiden: Selesaikan Kasus KKP dengan Diplomasi-News Liputan6.com. (2010). Retrieved May 13, 2017, from

<http://news.liputan6.com/read/291462/presiden-selesaikan-kasus-kkp-dengan-diplomasi>.

ReCAAP, 'Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia: Annual Report' (ReCAAP Information Sharing Centre, 1st January-31st December 2014), 12

Salim, T., & Parlina, I. (2015). Jokowi to skip APEC Summit-National The Jakarta Post. Retrieved May 13, 2017, from

<http://www.thejakartapost.com/news/2015/11/12/jokowi-skip-apec-summit.html>

- SBY Minta Penangkapan 3 Petugas DKP Diselesaikan Baik-baik. (2010). Retrieved May 13, 2017, from <https://news.detik.com/berita/d-1420851/sby-minta-penangkapan-3-petugas-dkp-diselesaikan-baik-baik>
- Sapiie, M, 2016. "RI honest broker in South China Sea dispute: Defense Minister". Dapat Diakses di halaman <http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/13/ri-honest-broker-in-south-china-sea-dispute-defense-minister.html>. Terakhir akses 30 Juni 2018.
- State Council Information Office, 2005. "*China's Peaceful Development Road*". Dapat di akses secara online pada alamat <http://www.china.org.cn/english/2005/Dec/152669.htm>. Terakhir akses 02 September 2018.
- Stockholm International Peace Research Institute. (2017). SIPRI Data Base. Dapat diakses secara daring di halaman <https://www.sipri.org/databases/milex>. Terakhir akses 03 Juli 2018.
- Suastha, 2017. "Diprotes China, RI Daftarkan Nama Laut Natuna Utara". <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170720172204-106-229239/diprotes-china-ri-daftarkan-nama-laut-natuna-utara-ke-pbb>. Terakhir akses 20 Juli 2018
- Vietnam Embassy (2018), Newspaper Welcomes Indonesian President's Visit to Vietnam, vietnamembassy-usa.org, online: <http://vietnamembassy-usa.org/news/2001/08/newspaper-welcomes-indonesian-presidents-visit-vietnam> (5 January 2018).
- Vietnamplus.vn (2017), Party chief visits Indonesian studies centre, Vietnamplus.vn, 23 August, online:<<https://en.vietnamplus.vn/pm-approves-national-action-plan-to-combat-iuu-fishing/125503.vnp>> (15

- January 2018).
- Vietnamplus.vn (2018), PM approves national action plan to combat *IUU Fishing* , Vietnamplus.vn, 24 January, online: <<https://en.vietnamplus.vn/pm-approves-national-action-plan-to-combat-iuu-fishing/125503.vnp>> (10 January 2018).
- Ward, O (2017), Troubled Waters? The Unresolved Issue of Fisheries in the South China Sea, ASEAN today, 15 August, online: <<https://www.aseantoday.com/2017/08/troubled-waters-the-unresolved-issue-of-fisheries-in-the-south-china-sea/>> (6 January 2018).
- Wiji, N. 2017. "Susi Minta Penegakan *Illegal fishing* Tahun ini Lebih Tegas." Kumparan. Januari 20. Accessed Juni 09, 2017. <https://kumparan.com/wiji-nurhayat/susi-minta-penegakanillegal-fishing-tahun-ini-lebih-tegas>.
- Taipeitimes.com, 2005. "China defends shooting of Vietnamese". Dapat diakses di halaman <http://www.taipeitimes.com/News/world/archives/2005/01/16/2003219623>. Terakhir akses 02 Juli 2018.
- Thailand NPOA-IUU, (2015). Thailand National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Dapat diakses secara online pada halaman <https://www.ecolex.org/details/legislation/thailand-national-plan-of-action-to-prevent-deter-and-eliminate-illegal-unreported-and-unregulated-fishing-thailand-npoa-iuu-2015-2019-lex-faoc169693/>. Terakhir akses 02 Juli 2018.
- Thayer, C. (2014). Tensions set to rise in the South China Sea. The Diplomat, 19. Terakhir akses 02 Juli 2018.

- The Voice of Russia, 22 June 2011; BBC Vietnamese Service, 24 August 2011 and 25 October 2011; and Interfax-AVN, 11 October 2011. Terakhir akses 02 Juli 2018.
- Tsirbas, M, 2016. "What Does the Nine-Dash Line Actually Mean? The Diplomat, 2 June 2016, <http://thediplomat.com/2016/06/what-does-the-ninedash-line-actually-mean/>.
- Top 50 World Container Ports, see <http://www.worldshipping.org/about-the-industry/globaltrade/top-50-world-container-ports> pada 14 Oktober 2015.
- UN.org, n.d. "*UNCLOS/LOS Convention*". Dapat diakses di http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part9.htm. Terakhir akses 02 Juli 2018.
- U.S. Energy Information Agency (2011): *China: International Energy Data and Analysis*. Dapat diakses secara online pada alamat http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/China/china.pdf. Terakhir akses 04 September 2018.
- U.S. Energy Information Agency (2015): *China: International Energy Data and Analysis*. Dapat diakses secara online pada alamat http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/China/china.pdf. Terakhir akses 04 September 2018.
- Widhiarto, H, 2014. Jokowi Declares War on *Illegal fishing* [Online]. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/18/jokowi-declares-war-illegal-fishing.html>. [diakses 20 Oktober 2017]
- Winata, R. 2015. "Pemberantasan *Illegal fishing* Belum Maksimal, HNSI Dukung Perpres *IUU Fishing* ." KKP News. Oktober 05. Accessed Oktober 10, 2017. <http://news.kkp.go.id/index.php/pemberantasan-illegal-fishing-belum-maksimalhnsi-dukung-perpres-iuu-fishing/>.

World Bank, 2016. “*World Data Bank*”. Dapat diakses secara online melalui alamat <http://databank.worldbank.org/data/home.aspx>. Terakhir akses 04 September 2018.

LAMPIRAN GAMBAR



Gambar 01. Wawancara Peneliti Dengan Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc.



Gambar 02. Wawancara Peneliti Kedua Kalinya Dengan Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc.



Gambar 03. Wawancara Peneliti Dengan Marsda TNI Ahmad Sajili, Asisten Deputi IV Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.



Gambar 04. Peneliti Mengikuti Rapat Koordinasi Strategi Pertahanan Terkait Masalah Natuna di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.



Gambar 05. Peneliti Melakukan Wawancara dengan Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P), Tony Herdijanto



Gambar 06. Peneliti Bersama Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P), Tony Herdijanto



Gambar 07. Peneliti Mendapat Pemaparan Terkait Kondisi Perairan Natuna dari Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P), Tony Herdijanto



Gambar 08. Kunjungan Peneliti ke Pembangunan Satpras Radar Weibel Tanjung Datuk, Kep. Natuna



Gambar 09. Peneliti Melakukan Wawancara dengan Staf Petugas Pembangunan Radar Weibel Tanjung Datuk, Kep. Natuna



Gambar 10. Peneliti Berada di Tempat Pembangunan Radar Weibel Tanjung Datuk, Kep. Natuna



Gambar 11. Peta Kekuatan TNI AL di Kep. Natuna



Gambar 12. Peneliti Melakukan Wawancara dengan Komandan Satuan Radar 212 Ranai Letkol Lek Bambang Budi Kuncoro



Gambar 13. Peneliti Melakukan Wawancara dengan Staff Satuan Radar 212 Ranai

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Indra Kusumawardhana, M.Hub.Int. - Pria yang akrab dipanggil Indra ini adalah seorang dosen tetap Program Studi Hubungan Internasional yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina yang masih menjabat hingga saat ini dan dilantik secara resmi sejak 17 Agustus 2019. Dr. Indra meraih gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada jenjang Sarjana (S1) jurusan Sastra Inggris di Universitas Airlangga,

Surabaya, tahun 2010. Kemudian di universitas yang sama, pada tahun 2012 Dr. Indra meraih gelar Magister Hubungan Internasional (M.Hub.Int.) dengan menempuh pendidikan jenjang Magister (S2) Hubungan Internasional dan mengambil konsentrasi dalam bidang Globalisasi dan Strategi. Dr. Indra kemudian mendapatkan gelar Doktor (S3) pada tahun 2019 dalam bidang yang sama yaitu Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung. Dr. Indra lulus dengan predikat Pujian (*Cumlaude*) setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Respons Indonesia Terhadap Vietnam Dan Cina Dalam Menghadapi Kontestasi Keamanan Maritim Di Perairan Natuna Terkait Potensi *“Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing”* Pada Era Presiden Joko Widodo Di Tahun 2014 - 2017” (*Indonesia’s Response Towards Vietnam And China To Tackle The Maritime Security Contestation Within Natuna’s Territorial Waters Related To The Potential Of “Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing” In The Era Of President Joko Widodo 2014 - 2017*).

Selama menjadi Dosen Tetap pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina, Dr. Indra memiliki keahlian dalam bidang: *International Political Economy, Regional Studies, Maritime Security, Foreign Policy, dan Energy Security*. Dengan fokus ke beberapa pengajaran dalam bidang seperti: Ekonomi Politik Internasional, Politik

Dunia, Geoekonomi dan Geostrategi, Teori Hubungan Internasional, Negara dan Keamanan Energi.

Sebagai seorang akademisi yang selalu haus akan kegiatan penelitian, Dr. Indra telah menulis puluhan artikel yang telah berhasil dipublikasikan setidaknya dalam 31 jurnal nasional maupun internasional. Dari sekian banyak jurnal Dr. Indra yang telah terpublikasi, salah satu contoh publikasi yang banyak disitasi oleh para-authors adalah artikel yang berjudul “Indonesia di Persimpangan: Urgensi “Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender” di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017”; *The Implication of Indonesia’s IUU Fishing Policy in Natuna Territorial Waters towards South China Sea Geopolitics*; “*State and Right-Wing Populism: Analysis on the Kemenko Polhukam RI Persuasion Approach in Responding the Wave Of “212” Movement*”; dan *The unbreakable relations between Indonesia-Vietnam post “Sink the Vessels” policy: a complex systems Approach* . Selain itu, saat ini ia juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi *Center for ASEAN Research on Energy (CARE)* Universitas Pertamina, dan *Editor in Chief Journal of International Studies in Energy Affairs (JISEA)*, Universitas Pertamina.